



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI AMRIL
2. Jabatan : KEPALA SATPOL PP WILAYAH
3. NHK : 471245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.210.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/180 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 1.318 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 1.616 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 464.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA NCFI1A1CFAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, BENELLI P. EAGLE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOBIL, SUZUKI SUZUKI XL7 BETA AT / MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	274.673.246
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.948.673.246
III. HUTANG	Rp.	172.107.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.776.565.746

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.